
ANALISIS FRAMING KOMUNIKASI POLITIK AHMAD SAHRONI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DPR RI (2025)

Oleh
Rina Raflina
Institut Ilmu Sosial & Manajemen STIAMI
Email: raflinarina@gmail.com

Article History:

Received: 06-09-2024

Revised: 27-09-2025

Accepted: 09-10-2025

Keywords:

framing analysis,
political
communication, Ahmad
Sahroni, housing
allowance.

Abstract: *This study aims to analyze the framing of political communication by Ahmad Sahroni, Deputy Chairman of Commission III of the Indonesian House of Representatives (DPR RI), in responding to the 2025 housing allowance issue for legislators. The issue sparked public debate due to its sensitivity in relation to the nation's socio-economic conditions. Using a qualitative approach with framing analysis, this research examines how the media constructed Sahroni's political discourse, particularly through Entman's and Pan & Kosicki's models. The findings indicate that Sahroni's framing emphasized the legitimacy of legislators' facility needs, administrative justification, and the importance of transparency and accountability in state budget allocation. Meanwhile, the media provided diverse representations, ranging from defending legislative image to criticizing social sensitivity. These findings reveal that Sahroni's political communication framing functions not only as a strategy to maintain personal and institutional reputation, but also as a form of issue management in the context of Indonesian democracy.*

PENDAHULUAN

Salah satu hal penting dalam penerapan demokrasi masa kini adalah komunikasi politik. Cara anggota legislatif menyampaikan pesan berpengaruh besar terhadap cara masyarakat memandang dan memahami berbagai isu. Salah satu strategi yang sering digunakan dalam komunikasi politik adalah teknik framing melalui media massa. Pan dan Kosicki (1993), menegaskan bahwa framing adalah cara media menyusun informasi agar suatu aspek tertentu dalam suatu keadaan terlihat lebih jelas dibandingkan aspek yang lain.

Di Indonesia, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kerap dijadikan fokus perhatian dan informasi publik terkait kebijakan dan sikap politik mereka.

Salah satu Wakil Ketua Komisi III DPR RI yaitu Ahmad Sahroni seing dijadikan sebagai sumber informasi dalam berbagai pemberitaan media yang terkait dengan isu legislatif serta kesejahteraan anggota DPR RI. Salah satu topik yang ramai diperbincangkan publik adalah soal tunjangan perumahan bagi anggota DPR. Isu ini memicu perdebatan mengenai transparansi, kemungkinan legitimasi, serta etika dalam penggunaan uang negara.

Persoalan atau Isu tentang tunjangan perumahan anggota DPR menjadi perhatian publik di tahun 2025 setelah pemerintah dan pimpinan DPR menetapkan satu skema mengenai tunjangan rumah dinas sebesar Rp50.000.000 per bulannya sebagai pengganti

prasarana rumah dinas (detiknews.com).

Aturan ini menimbulkan protes dari berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat, yang menanyakan aspek etika, keadilan, serta apakah hal ini sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Berbagai media menyampaikan kritik besar terhadap besarnya nilai tunjangan tersebut, serta masyarakat pun memberikan respons dengan cara menunjukkan kekecewaan melalui media sosial, seperti demonstrasi dan komentar tajam.

Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana media membangun frame terhadap komunikasi politik yang dilakukan Ahmad Sahroni yang terkait dengan isu tentang tunjangan perumahan anggota DPR. Cara media menyampaikan informasi tentang ujaran atau sikap anggota DPR dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan menilai isu tersebut. Analisis framing pun sangat relevan dalam penelitian ini, karena memberikan penjelasan bagaimana media dan retorika digunakan untuk membentuk opini publik.

Sahroni pernah beberapa kali menjawab kritik dengan argumen terkait efisiensi biaya jika diberikan tunjangan rumah kontrak setiap bulan, serta membandingkan dengan biaya perawatan rumah dinas anggota DPR. Pernyataan Sahroni tersebut memicu perdebatan di masyarakat yang berakibat pada citra pribadi politisi, bahkan menyebabkan pergantian jabatan dan sanksi dari internal partai bagi sejumlah anggota DPR. Fenomena komunikasi politik yang diungkapkan oleh Sahroni selaku anggota DPR RI itu diberitakan oleh media, karena menjadi isu yang menarik perhatian publik dan membentuk makna serta memperkuat tanggapan masyarakat.

Pendekatan analisis framing Pan dan Kosicki (1993) dengan tujuan untuk (1) mengidentifikasi atas pernyataan Sahroni mengenai kebijakan kompensasi biaya perumahan, (2) Menganalisis atau mengkaji strategi naratif, retorik dan kualitas dalam pernyataan tersebut; dan (3) menganalisis efek framing pemberitaan mengenai pernyataan Sahroni di dua media online yaitu Metro TV News dan Detik News tentang persepsi publik.

Peneliti menganggap penting penelitian ini karena dapat memberikan pemahaman yang empiris mengenai komunikasi politik dari anggota legislatif dalam kondisi krisis reputasi serta mendeskripsikan atau menggambarkan framing yang dijalankan media terhadap pernyataan Ahmad Sahroni sebagai anggota legislatif yang memengaruhi opini masyarakat.

Secara metodologis, riset ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing Pan dan Kosicki (1993) tentang pernyataan - pernyataan Sahroni yang terdapat di berbagai media daring dan rekaman wawancara atau konferensi pers pada tanggal 13 September 2025.

Hasil analisis ini akan merujuk pada dimensi - dimensi framing menurut Pan dan Kosicki (1993), yaitu struktur sintaktik, skrip dan tematik, serta retorik. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan cara media memframe pernyataan Sahroni soal tunjangan rumah anggota legislatif (DPR) dan konsekuensi atas komunikasi politiknya Ahmad Sahroni.

LANDASAN TEORI

Framing adalah cara berpikir dalam menganalisa komunikasi politik yang memperhatikan bagaimana realitas sosial dibuat, dipilih, dan disampaikan melalui media atau pernyataan tokoh politik. Dalam pendekatan ini, isu tidak hanya dianggap sebagai fakta yang objektif, tetapi diatur ulang (dibingkai) agar menonjolkan bagian tertentu dan

mengabaikan bagian lainnya.

Pan dan Kosicki (1993) mengusulkan model analisis pembingkai (framing) yang lebih terstruktur. Pan dan Kosicki menekankan bahwa framing bisa dianalisis melalui penggunaan bahasa dalam berita atau komunikasi politik yang mencakup empat aspek utama:

- a) Struktur Sintaksis: Terkait dengan cara penyusunan kalimat atau penulisan kalimat seperti penggunaan kutipan langsung atau tidak langsung, pemilihan subjek serta pola dalam penyajian berita. Sintaksis memberikan pengaruh terhadap siapa yang dilihat sebagai tokoh utama.
- b) Struktur Skrip: Ada kaitan dengan alur cerita atau urutan penyampaian peristiwa. Misalnya, isu tunjangan rumah bisa disajikan dalam narasi administratif maupun dalam bingkai krisis atau dalam bingkai normalisasi.
- c) Struktur Tematik: Merujuk pada konsistensi gagasan utama atau pola argumen dalam teks. Contohnya, pengulangan kata seperti “beban negara” atau “efisiensi” menunjukkan tema dominan.
- d) Struktur Retoris: Yang berkaitan dengan penggunaan gaya bahasa dan metafora serta penekanan kata atau simbol untuk memperkuat pesan. Contohnya, pernyataan Sahroni “jangan lihat dari nilainya, itu biasa”, pernyataan tersebut dapat dianggap sebagai alat retorik untuk menyelaraskan kebijakan.

Dalam komunikasi politik di Indonesia, framing sering digunakan oleh para politisi untuk memengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang memicu perdebatan, kebijakan, atau citra pribadi mereka. Framing bukan hanya alat yang digunakan oleh media, tetapi juga menjadi strategi yang dilakukan oleh para aktor politik dalam membangun dan mengelola persepsi masyarakat. Analisis framing pernyataan Sahroni tentang tunjangan perumahan anggota DPR RI tahun 2025 menjadi penting karena:

- a) Menunjukkan bagaimana seorang anggota dewan berusaha mengalihkan perhatian publik dari fakta angka ke aspek efisiensi.
- b) Menggambarkan bagaimana media mengambil, mengubah, atau memperkuat frame tersebut dalam laporan berita mereka.
- c) Menjelaskan hubungan antara cara berbicara dalam politik, keabsahan kebijakan, dan respons dari masyarakat.

Oleh karena itu, Pan & Kosicki membantu pembacaan yang detail melalui struktur atau susunan teks guna untuk mengerjakan analisis framing dalam komunikasi politik Sahroni terkait tunjangan perumahan 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mempergunakan metode (pendekatan) kualitatif dengan proses analisis framing. Metode kualitatif dipilih berdasarkan referensi Moleong (2017) yang memberikan penekanan mengenai pemahaman terhadap makna dari wacana, teks atau pernyataan. Penggunaan analisis framing dengan tujuan untuk melihat sejauh mana media memframing isu-isu tertentu (Pan dan Kosicki, 1993).

Dipilihnya analisis framing karena metode ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi atau mengenali strategi komunikasi yang dipergunakan oleh Ahmad Sahroni untuk memberikan pengaruh terhadap persepsi publik mengenai kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR.

Data primer diperoleh dari pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh media yang

terdapat dalam hasil wawancara dengan media online yang memberitakan tanggapan Sahroni tentang tunjangan perumahan anggota DPR pada tahun 2025. Sementara itu, data sekunder didapat dari literatur yang terkait dengan teori framing dan komunikasi politik, serta analisis wacana legislator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI pada tahun 2025 memicu berbagai reaksi di masyarakat, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang. Dalam komunikasi politik, pernyataan dari Ahmad Sahroni sebagai anggota DPR RI, merupakan bahan analisis penting melalui pendekatan framing. Hasil analisis menunjukkan ada dua konstruksi utama dalam framing tersebut. Pertama, framing negatif, di mana media menganggap tunjangan perumahan sebagai simbol kemewahan yang tidak memperhatikan kondisi ekonomi rakyat. Hal ini mencerminkan ketimpangan sosial, ketidakadilan dalam distribusi anggaran, dan kurangnya empati politisi terhadap masyarakat.

Karena itu, opini publik cenderung melihat bahwa kebijakan atau aturan tunjangan lebih mengutamakan kepentingan pribadi anggota dewan daripada kebutuhan masyarakat. Kedua, framing atau pembikaaian defensif, di mana Ahmad Sahroni berusaha menjelaskan mengenai tunjangan perumahan bukan fasilitas mewah, melainkan hak normatif bagi anggota DPR sebagai bagian dari kelayakan kerja dan tanggung jawab jabatan. Framing ini, penjelasan bahwa Sahroni mengarah pada legitimasi yang struktural serta profesional, seolah - olah tunjangan tersebut menjadi hasil alami dari posisinya sebagai wakil rakyat.

Penemuan ini menunjukkan adanya perbedaan makna antara aktor politik dan media. Media berperan sebagai pemandu agenda yang dalam meberikkan penegasa jarak antara elit dan rakyat dengan narasi kritis. Sementara Ahmad Sahroni berusaha menenangkan kritik dengan argumen yang berlandaskan norma. Ahmad Sahroni memberikan pernyataan bahwa tunjangan perumahan yang jumlahnya sebesar Rp. 50 juta per bulan kepada anggota legislatif tidak perlu dianggap sebagai angka yang terlalu besar. Ia menjelaskan bahwa biaya tunjangan ini lebih murah dibandingkan biaya pemeliharaan rumah dinas sebelumnya lebih besar sepuluh kali besar dari nilai tunjangan. Sahroni juga menyebut bahwa "sebagian besar masyarakat cenderung senang melihat orang yang hidupnya susah dan tidak suka melihat orang berbahagia" (metrotv news).

Analisis framing memperlihatkan bahwa pernyataan Sahroni tentang tunjangan perumahan bagi anggota DPR tahun 2025 dibangun melalui pendakatan komunikasi politik yang fokus pada penjelasan mengenai kelegitiman kebutuhan dan peran institusi.

Menurut pendekatan Pan dan Kosicki (1993), framing yang digunakan Sahroni dalam wawancaranya meberikan penekankan pada poa pembicaraan dan struktur retorika.

Ia mencoba membangun citra sebagai seorang anggota DPR yang terbuka dan realistis dengan memberikan menekankan bahwa tunjangan tersebut merupakan bagian dari aturan institusi, bukan semata-mata kepentingan pribadi. Dengan strategi ini bisa dianggap sebagai bentuk retorika untuk mendapatkan kepercayaan dan mengurangi penolakan dari masyarakat.

Tabel 1 Ringkasan Pemberitaan DetikNews & Metrotvnews

Struktur (Pan & Kosicki)	DetikNews	Metrotvnews
Sintaksis (judul & lead)	Judul : “Jangan lihat nilainya, itu biasa sebenarnya”. Menonjolkan kesan Sahroni menyepelekan reaksi publik.	Judul menonjolkan argumen efisiensi: “Kalau dikasih fasilitas rumah, biayanya 10 kali lipat dari tunjangan”. Menggiring isu ke rasionalitas biaya.
Skrip (alur informasi)	Dimulai dari pembelaan Sahroni, lalu segera diikuti kritik publik bahwa Rp 50 juta “fantastis”. Kritik ditempatkan sebagai penyeimbang dominan.	Dimulai dengan argumen teknis Sahroni tentang biaya rumah dinas, kemudian kritik publik hadir di bagian akhir sebagai pelengkap.
Tematik (tema besar)	Tema utama: DPR tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Ada kesan “jurang elit-rakyat”.	Tema utama: efisiensi dan kelayakan tunjangan dibandingkan biaya rumah dinas. Lebih mengarah pada rasionalisasi kebijakan.
Retoris (bahasa & simbol)	Menggunakan diksi “wow, fantastis” untuk menggambarkan suara publik. Menampilkan Sahroni dengan kata “wajar” namun tetap dikontraskan.	Menggunakan detail teknis seperti “AC, hordeng, dapur, gas” untuk menekankan logika realistis. Retorika teknis memperkuat kesan rasional.

Dengan menggunakan pola framing Pan dan Kosicki, analisis ini menjelaskan bagaimana media membentuk makna dengan menggunakan empat struktur utama yang terdiri dari sintaksis, skrip dan tematik serta retorik.

a) Struktur Sintaksis.

Memberikan penekanan Judul: Struktur dalam sintaksis menunjukkan cara media membentuk persepsi pembaca sejak dari awal lewat judul dan bagian awal berita.

- DetikNews menggunakan judul yang mengutip langsung Sahroni: “Jangan dilihat nilainya itu nominalnya, sebenarnya itu biasa ” (DetikNews). Kalimat ini membawakan Sahroni sebagai seseorang yang berusaha menyampaikan bahwa tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulannya tidak begitu besar. Kata “biasa” memberikan kesan kontras dengan pendapat umum yang menganggap bahwa nominal tersebut terlalu besar.
- MetroTVnews lebih menyoroti aspek efisiensinya: “Kalau dikasih fasilitas perumahan, itu biayanya mungkin lebih 10 kali lipatnya dari yang diberi tunjangan” (MetroTV). Narasi ini menunjukkan bahwa media mencoba membongkar tunjangan sebagai pilihan yang lebih rasional dibandingkan mendapatkan rumah dinas yang

dianggapnya lebih mahal. Adanya perbedaan dalam penekanan ini memperlihatkan bahwa DetikNews memfokuskan pada sisi moral dari isu tersebut, sementara MetroTVnews lebih memfokuskan pada aspek rasionalitas kebijakan.

b) Struktur Skrip.

Urutan penulisan informasi dalam berita menunjukkan cara makna dibangun.

- DetikNews, beritanya dimulai dengan pembelaan terhadap Sahroni, namun langsung disusul kritik dari masyarakat, seperti penekanan bahwa "tunjangan sebesar Rp 50 juta dianggap luar biasa oleh publik." Dengan meletakkan kritik setelah kutipan dari Sahroni, DetikNews menciptakan perbandingan antara pihak elit dan tanggapan masyarakat.
- Sebaliknya, MetroTVnews memulai beritanya dengan detail teknis, seperti kutipan Sahroni: "Masing-masing rumah punya masalah berbeda, ACnya, hordengnya, gasnya serta dapurnya, nah itu lebih mahal." (MetroTVnews.com). Kritik publikpun muncul setelahnya, seolah hanya sebagai tambahan, bukan inti dari cerita. Hal ini menunjukkan bahwa urutan informasi memengaruhi citra yang muncul. Detiknews memberi ruang untuk konflik antara pihak penguasa dan rakyat, sedangkan MetroTVnews menekankan argumen teknis dan perekonomian.

c) Struktur Tematik.

Tema serta Pola Argumen: Tema utama yang timbul adalah adanya pertentangan antara legitimasi pihak elit dan kritik moral dari publik.

- DetikNews menyusun tema bahwa anggota DPR dianggap tidak memahami kondisi masyarakat. Pembingkai atau framing ini terlihat dalam penggunaan kata "wow, fantastis" untuk menunjukkan persepsi publik terhadap besarnya tunjangan. Tema utamanya adalah kesenjangan antara kepentingan pihak elit dan kehidupan rakyat.
- MetroTVnews memberikan tema yaitu efisiensi dan kebijakan yang masuk akal. Framing yang digunakan menunjukkan bahwa tunjangan senilai Rp 50 juta tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan biaya dalam pemeliharaan rumah dinas. Pola argumen yang dibangun adalah perhitungan kebijakan, bukan sekadar pengeluaran berlebihan. Dari sini bisa dilihat bahwa media belum atau tidak netral karena masing-masing memilih tema sesuai garis redaksi dan audiens yang dituju.

d) Struktur Retoris.

Pilihan kata, gaya bahasa serta simbol: Struktur retorik menunjukkan bagaimana pemilihan bahasa memengaruhi makna.

- Ahmad Sahroni menggunakan kata seperti "layak", "wajar", dan "uangnya kembali ke masyarakat". Retorika ini membentuk citra moral bahwa penghasilan dan tunjangan bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Dalam wawancara Sahroni dengan DetikNews, ia menegaskan bahwa: "Semua gaji serta tunjangan dari dulu saya selalu berikan kembali kepada masyarakat, itu wajib."
- DetikNews memperkuat retorika dari publik dengan kata-kata yang memicu emosi seperti "wow, fantastis", sehingga menciptakan perbedaan yang tajam antara pihak penguasa dan masyarakat.
- MetroTVnews justru menekankan secara detail secara teknis seperti "AC, hordeng, dapur, gas" untuk memberikan gambaran nyata tentang biaya dalam perawatan rumah dinas anggota DPR sehingga memperkuat argumen yang rasional. Oleh karena itu,

retorika yang dibangun oleh media menentukan cara publik memaknai isu: apakah dianggap sebagai ketidakpekaan penguasa atau efisiensi dalam kebijakan.

Dari keempat struktur kajian Pan dan Kosicki, bisa disimpulkan bahwa media mempunyai peran yang penting dalam membangun citra Ahmad Sahroni serta DPR RI.

a) Interpretasi Media

- Media seperti DetikNews biasanya menampilkan sudut pandang yang kritis, sesuai dengan peran media dalam mengontrol masyarakat.
- Media seperti MetroTVnews cenderung lebih memperkuat narasi yang mendukung elit, menunjukkan bahwa media juga bisa digunakan sebagai alat untuk mempertahankan legitimasi politiknya.

b) Implikasi Politik

- Framing yang negatif bisa membuat DPR semakin dianggap sebagai lembaga yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyat.
- Framing positif memberi kesempatan bagi para elit politik dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan dengan menggunakan argumen teknis dan efisiensi atau tepat guna.

c) Citra Legislator

- Sahroni berusaha menciptakan citranya sebagai seorang anggota DPR yang wajar serta peduli pada rakyat, melalui penekanan pada penyaluran “uang kembali lagi ke masyarakat”. Akan tetapi, framing yang digunakan oleh media kritis justru memperkuat persepsi bahwa DPR lebih memprioritaskan fasilitas daripada perhatian sosial.

Menurut analisis, framing media tentang pernyataan Sahroni menunjukkan adanya perdebatan dalam pembentukan wacana atau diskusi. Media seperti DetikNews lebih cenderung memberikan ruang pada framing yang negatif, di mana DPR dipandang tidak sensitif dan terlalu memperhatikan kepentingan pribadi. Sementara itu, media MetroTVnews memperlihatkan framing yang lebih positif dan defensif, di mana usulan tunjangan tersebut dianggap sebagai solusi dalam efisiensi beban negara.

Dari perspektif para elit politik, pembingkaihan yang dibangun oleh Sahroni mempunyai fungsi sebagai strategi komunikasi yang defensif untuk membenarkan tuntutan DPR. Sebaliknya, dari perspektif publik dan media yang kritis, framing tersebut digunakan untuk menegaskan adanya kesenjangan dalam representasi antara rakyat dan wakil rakyat. Hal ini mencerminkan bahwa isu mengenai tunjangan perumahan anggota DPR bukan hanya soal fasilitas, akan tetapi masalah pertarungan makna antara keabsahan dan ketidakabsahan lembaga DPR.

Dari sudut pandang komunikasi politik, pembingkaihan yang dilakukan Sahroni memberikan gambaran tentang strategi legislator dalam mengatur isu sekaligus mempertahankan reputasi di mata publik. Hal tersebut dianggap sebagai bagian melalui fungsi manajemen komunikasi dalam kerangka public relations, (Lattimore, et al., 2010).

Ia berusaha mengelola narasi publik agar supaya tidak terlalu negatif, sekaligus menjaga kredibilitasnya sebagai seorang pejabat. Namun, cara penyampaian ini bisa efektif atau tidak, tergantung pada seberapa besar media dan masyarakat menerima argumen yang disampaikan.

Akibat dari cara ini adalah adanya perpecahan pendapat di kalangan masyarakat. Beberapa orang merasa kebijakan tunjangan perumahan menunjukkan ketidakadilan,

sedangkan kelompok lain menerima penjelasan dari legislator bahwa tunjangan itu merupakan hasil dari struktur kelembagaan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya cara penyampaian dalam menciptakan opini publik terhadap isu-isu sensitif yang melibatkan tokoh-tokoh elite politik.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis framing menggunakan model Pan dan Kosicki (1993), terdapat beberapa poin penting yang bisa diambil:

- a) Media membingkai isu dengan cara yang berbeda.
 - DetikNews lebih fokus pada sisi ulasan moralnya dengan menyoroti bahwa pernyataan Sahroni mengenai tunjangan Rp50 juta yang dianggap "fantastis" oleh masyarakat. Framing ini memberikan penguatan kesan bahwa anggota DPR tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
 - MetroTVnews lebih menekankan aspek rasionalisasi kebijakan, dengan fokus pada argumen Ahmad Sahroni bahwa tunjanganannya lebih efisien dibanding dengan biaya perawatan rumah dinas yang lebih mahal.
- b) Disparitas framing terjadi pada empat konstruksi utama menurut Pan dan Kosicki (1993).
 - Pada sintaksis, DetikNews menggunakan kata "biasa" dan "fantastis", sedangkan MetroTVnews lebih menekankan kata "efisiensi" dan detail teknis.
 - Dalam skrip, DetikNews memberikan ruang yang besar pada kritik dari publik, sedangkan MetroTVnews lebih terlebih dahulu memaparkan argumen Sahroni.
 - Pada tematik, DetikNews menyoroti perbedaan antara elit dan rakyat, sedangkan MetroTVnews lebih menekankan legitimasi rasional.
 - Dalam retorik, DetikNews menggunakan bahasa emosional publik, sedangkan MetroTVnews lebih menggunakan bahasa teknis dan rasional.
- c) Implikasi citra dan politik anggota legislatif.
 - Framing yang negatif (DetikNews) bisa memperkuat gambaran DPR sebagai lembaga elit yang jauh dari rakyat.
 - Framing yang positif (MetroTVnews) memberikan peluang bagi Sahroni dan anggota DPR lainnya untuk menjaga legitimasi dengan menggunakan argumen efisiensi.
- d) Perang makna di ruang publik.

Pokok persolana mengenai tunjangan DPR bukan hanya soal keuangan, tetapi juga menjadi tempat adanya perdebatan makna antara legitimasi dari kalangan elit politik serta delegitimasi dari masyarakat. Media berperan sebagai pihak yang menentukan tujuan opini publik melalui cara membingkai isu.

SARAN

Untuk menyempurnakan hasil analisis pembedaan dalam komunikasi politik Sahroni terkait tunjangan perumahan anggota DPR RI menggunakan model Pan dan Kosicki, berikut beberapa saran:

1. Media perlu memberikan pemberitaan yang seimbang dengan menghadirkan suara dari kalangan elit dan perspektif civil society secara proporsional.

2. Penyajian berita sebaiknya didasarkan pada data dan konteks yang jelas, sehingga framing yang digunakan tidak hanya menciptakan sensasi, tetapi juga membantu memperkaya pemahaman masyarakat.

Dengan saran tersebut, diharapkan riset di masa depan dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai hubungan antara framing mediadan komunikasi politik serta persepsi publik dalam kerangka kebijakan yang melibatkan hajat rakyat dan kalangan elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2010). Public Relations: The Profession and the Practice. New York: McGraw-Hill.
- [2] Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [3] Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political Communication, 10(1), 55–75.
<https://doi.org/10.1080/10584609.1993.9962963> [https://](https://news.detik.com/berita/d-8071302/sahroni-soal-tunjangan-rumah-dpr-rp-50-juta-jangan-lihat-nilainya-itu-biasa?utm_source=chatgpt.com)
- [4] 50-juta-jangan-lihat-nilainya-itu-biasa?utm_source=chatgpt.com (dibuka September 2025) [https://www.metrotvnews.com/play/NOICA6G5-sahroni-tepis-tunjangan-rumah-anggota-](https://www.metrotvnews.com/play/NOICA6G5-sahroni-tepis-tunjangan-rumah-anggota-dpr-dianggap-nirempati-ke-rakyat?utm_source=chatgpt.com)
- [5] dpr-dianggap-nirempati-ke-rakyat?utm_source=chatgpt.com. (dibuka September 2025)

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN